

PENGARUH DISTRIBUSI PENDAPATAN TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA

Rima Umami Hasibuan

UIN Sumatera Utara, Indonesia

rimainfinix12@gmail.com

Rizqi Sahdila

UIN Sumatera Utara, Indonesia

rizqisyahdila@gmail.com

Abstract

This research was motivated by a lack of understanding and problems faced, especially in Indonesia, namely regarding the influence of income distribution on poverty. The aim of this research is to provide some understanding of the problems faced by the Indonesian nation in achieving the goals of prosperity and prosperity for all its people. Namely understanding the distribution of income in economic development regarding the welfare of society. Income distribution is related to poverty, in fact until now the problem of poverty has not been fully resolved. Lack of equal distribution of income and other problems, where poverty has complex problems whose root causes are like tangled threads that are interconnected with each other making it difficult to break the chain. The results of this research are that income distribution is still unequal, giving rise to the level of poverty in Indonesia.

Keywords: Income Distribution, Poverty, Economic Development.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi karena kurangnya pemahaman dan permasalahan yang dihadapi khususnya di Indonesia yaitu mengenai pengaruh dari distribusi pendapatan terhadap kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan beberapa pemahaman tentang permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Yaitu memahami mengenai distribusi pendapatan dalam pembangunan ekonomi tentang kesejahteraan masyarakatnya. Distribusi pendapatan berkaitan dengan kemiskinan, bahwasanya sampai saat ini masalah kemiskinan belum sepenuhnya bisa diatasi. Kurangnya pemerataan distribusi pendapatan dan masalah-masalah lainnya, di mana kemiskinan memiliki permasalahan yang kompleks yang akar penyebabnya seperti benang kusut yang saling berhubungan satu dengan yang lain sehingga sulit untuk memutus rantainya. Hasil dari penelitian ini ialah masih kurang meratanya distribusi pendapatan sehingga menimbulkan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia.

Kata Kunci : Distribusi Pendapatan, Kemiskinan, Pembangunan Ekonomi

PENDAHULUAN

Distribusi pendapatan dan keseimbangan yang adil dalam masyarakat ialah salah satu persyaratan untuk mendapatkan suatu masyarakat yang dikatakan makmur. Perlu kita ketahui bahwasanya sasaran dari keseimbangan pendapatan menyangkut pada pelayanan publik, Bagaimana pendapatan tersebut dan konsep kesejahteraan yang secara umum didistribusikan secara merata dan adil kepada masyarakatnya. Seharusnya pemberantasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan dalam masyarakat harus selayaknya ditinjau kembali dan tidak lebih menekan kepada orientasi konsep pembangunan ekonomi yang meningkatkan laju ekspansi PDB ke tingkat setinggi mungkin. Harus

dicermati bersama bahwasanya konsep pembangunan ekonomi kemasyarakatan seharusnya diimplementasikan dalam kebijakan dan program kerja serta perencanaan dan strategi pembangunan ekonomi yang lebih memfokuskan pada penyeimbangan distribusi pendapatan dalam upaya untuk memberantas kemiskinan khususnya yang ada di Indonesia. Akan tetapi selayaknya dalam permasalahan pemberantasan kemiskinan dan distribusi pendapatan tidak harus mengabaikan pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi juga dibutuhkan dan sangat penting dalam upaya pemberantasan kemiskinan ini. Jadi permasalahan yang dihadapi sekarang yaitu tentang metode ekspansi ekonomi yang memberikan manfaat yang sama bagi semua orang yang dirasakan oleh seluruh masyarakatnya tanpa ada ketimpangan distribusi pendapatan dalam upaya memberantas kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Kami sebagian besar mengandalkan penelitian yang dilakukan di perpustakaan. Apabila seorang peneliti membaca buku, catatan, dan laporan temuan penelitian masa lalu yang terdapat di perpustakaan, maka ia dikatakan telah melakukan penelitian kepustakaan (Library study).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Distribusi Pendapatan

Namun, perbedaan kecerdasan dan kemampuan fisik manusia tidak menjelaskan mengapa sebagian orang mampu memperoleh kekayaan lebih mudah dibandingkan yang lain; sebaliknya, mekanisme distribusi yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya adalah penyebabnya (Zaki Fuad Chalil,2009). Ide utama di balik distribusi adalah untuk memperluas dan mendistribusikan hasil-hasil kemakmuran sehingga kekayaan dapat didistribusikan secara lebih luas dan merata, dibandingkan terkonsentrasi di tangan segelintir orang saja (Afzalurrahman,1996).

Ada tiga cara untuk mendekati isu kesenjangan ekonomi:

1. Kesenjangan Pendapatan Ras dan Etnis, Pendapatan Dengan menggunakan koefisien Gini, jelas terlihat bahwa distribusi pendapatan di perkotaan lebih tidak merata dibandingkan di wilayah pedesaan.
2. Akibat pola pembangunan yang berpihak pada perkotaan yang berbasis pada sektor industri, maka timbulah kesenjangan pendapatan antara masyarakat pusat perkotaan dan perdesaan di Indonesia. Masyarakat pedesaan hanya dapat memperoleh pendapatan dari sektor pertanian.
3. Ketimpangan dalam alokasi sumber daya alam, kesenjangan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia, dan faktor-faktor lainnya berkontribusi terhadap tidak meratanya distribusi kekayaan di Indonesia.

Indikator distribusi pendapatan individu, kurva Lorenz, dan koefisien Gini adalah tiga bentuk indikator distribusi pendapatan yang paling umum digunakan dalam pendapatan nasional. Ada hubungan antara parameter-parameter ini di sini. Semakin besar deviasi kurva Lorenz dari diagonalnya, maka semakin tinggi disparitas pendapatan. Di sisi lain, distribusi kekayaan yang lebih seragam dapat diharapkan jika kurva Lorenz semakin dekat dengan garis diagonal. Untuk koefisien Gini, angka yang lebih kecil menunjukkan distribusi yang lebih seragam.

Kuznets berhipotesis, berdasarkan studinya terhadap negara-negara industri, bahwa distribusi pendapatan akan memburuk pada awal ekspansi ekonomi, namun kemudian membaik seiring dengan matangnya perekonomian. Sejak itu, kurva Kuznets U terbalik mewakili hasil penelitian ini. Oleh karena itu, teori Oshima menyatakan bahwa kesejahteraan pendapatan negara-negara Asia mengikuti kurva

Kuznets. Ardani mengatakan kesenjangan ketimpangan regional merupakan hasil alami dari kemajuan dan transisi alami dalam pembangunan.

Dalam ekonomi Islam, Zarqa mengemukakan berbagai prinsip distribusi (Muh Anas Zarqa, 1986), antara lain:

1. Untuk memenuhi kebutuhan semua makhluk hidup.
2. Meningkatkan mood pemberi.
3. menyebarkan niat baik antara si kaya dan si miskin.
4. Mengurangi kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin.
5. Pendekatan yang lebih ramah lingkungan terhadap pengelolaan sumber daya.
6. Memberi orang harapan melalui kemurahan hati Anda.

Dua model distribusi yang berbeda dibedakan dalam ajaran Islam: distribusi komersial berbasis pasar dan distribusi berdasarkan prinsip keadilan sosial. Sosialisasi melalui pasar melalui mekanisme moneter seperti upah, gaji, dan keuntungan. Sementara itu, bentuk distribusi yang berbasis keadilan sosial mencakup hal-hal seperti wasiat, zakat, infak, dan sedekah (Zaki Fuad Chalil). Oleh karena itu, politik distribusi yang mencakup berbagai elemen harus diupayakan untuk mencapai pemerataan.

1. Hukum yang mengatur kepemilikan properti, baik publik maupun swasta.
2. Pengembalian investasi uang dan barang modal, serta penggunaan lahan, model pembagian pendapatan berdasarkan alokasi tugas, gaji atau upah, dan tingkat kesejahteraan.
3. Ketika kebutuhan dasar mereka yang membutuhkan terpenuhi, masyarakat dan negara telah memenuhi kewajiban jaminan mereka terhadap orang-orang tersebut dan mencegah kejahatan karena tidak memenuhi kebutuhan mereka.

Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan sistem distribusi yang sesuai syariah yang dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan lahir dan batin bagi setiap manusia baik pada tingkat individu, kelompok, dan negara. Namun di Indonesia sendiri, kemiskinan menjadi sebuah hal yang perlu direnungkan untuk kita optimalkan ke depan, karena pendapatan yang belum merata di seluruh negeri. Hal ini mengakibatkan kemiskinan mempunyai permasalahan yang kompleks, yang akar permasalahannya ibarat benang kusut yang saling berhubungan. tambahan orang yang mempersulit pemutusan rantai.

Konsep Dasar Kemiskinan

Kemiskinan diartikan sebagai status sosial ekonomi seseorang atau kelompok ketika hak-hak esensialnya untuk mempertahankan dan membangun kehidupan yang layak tidak terpenuhi, sebagaimana tercantum dalam UU No. 24 Tahun 2004. Yang termasuk dalam hak hidup seseorang atau suatu kelompok adalah kebutuhan hidup, seperti pangan, perumahan, pakaian, pelayanan kesehatan, pendidikan, lingkungan yang aman dan sehat, bebas dari rasa takut akan bahaya fisik, dan kesempatan untuk hidup. ikut serta dalam pengelolaan kehidupan sosial dan politik. Sederhananya, kemiskinan didefinisikan sebagai kurangnya sumber daya untuk menutupi biaya hidup yang penting. Tiga faktor ekonomi disorot oleh Sharp et al. sebagai kontributor utama terhadap pendapatan rendah.

1. Ketimpangan pendapatan merupakan akibat langsung dari distribusi sumber daya yang tidak merata. Masyarakat miskin mempunyai akses terhadap sumber daya yang sedikit dan berkualitas rendah.

2. Variasi kualitas sumber daya manusia yang tersedia mungkin mempunyai dampak signifikan terhadap produktivitas, gaji, dan standar hidup. Sumber daya manusia yang berkualitas rendah mungkin disebabkan oleh prasangka, bias, pola asuh yang buruk, atau nasib buruk.
3. Gagasan mengenai lingkaran setan kemiskinan merangkum akar penyebab kemiskinan.

Kemiskinan dapat dibagi menjadi empat kategori, tergantung pada penyebab utamanya:

1. Kemiskinan Absolut, Ketika pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan, ia dianggap hidup dalam kemiskinan absolut karena tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.
2. Sederhananya, kemiskinan relatif merupakan bagian dari kemiskinan yang muncul ketika manfaat program pembangunan tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan kesenjangan pendapatan dan kondisi kehidupan.
3. Kemiskinan akibat ketegaran masyarakat atau individu dalam mengadopsi cara-cara kontemporer untuk meningkatkan taraf hidup dikenal sebagai "kemiskinan budaya" atau "kemiskinan budaya".
4. Ketika suatu komunitas tidak dapat mengambil keuntungan dari cara-cara yang sah untuk menciptakan kekayaan, mereka dikatakan mengalami kemiskinan struktural.

Kemiskinan Yang Terjadi Di Indonesia

Karena pesatnya perkembangan ekonomi negara ini antara pertengahan tahun 1960an dan 1996, tingkat kemiskinan menurun di seluruh wilayah pedesaan dan perkotaan di Indonesia. Walaupun perekonomian berkembang pesat dari tahun 1987 hingga 1999, kesenjangan meningkat, khususnya di kota-kota besar. Mayoritas penduduk miskin (43,3%) pada tahun 1996 berada di luar Pulau Jawa dan Bali. Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Bagian Timur adalah rumah bagi lebih dari 20%. Tingkat pengentasan kemiskinan meningkat antara tahun 2002 dan 2007, dan hal ini merupakan kabar baik. Sepanjang tahun 2012, ketika tingkat kemiskinan berada pada titik terendah (29 juta jiwa), tren ini terus berlanjut.

Tabel 1.1
Statistik Kemiskinan dan Ketidaksetaraan di Indonesia

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kemiskinan Relatif (% dari populasi)	15,6	15,4	14,2	13,3	12,5	11,7	11,5	11,0	11,1	10,9
Kemiskinan Absolut (dalam jutaan)	37	35	33	31	30	29	29	28	29	28 ^a
Koefisien Gini/ Ratio Gini	0,35	0,35	0,37	0,38	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40

Sumber : Bank Dunia dan BPS, Maret 2016

Data pada tabel di atas menunjukkan penurunan kemiskinan nasional secara bertahap namun stabil. Namun penting untuk dicatat bahwa pemerintah Indonesia menerapkan persyaratan yang tidak terlalu ketat dalam menentukan garis kemiskinan, sehingga menciptakan ilusi bahwa situasi tersebut lebih baik daripada keadaan sebenarnya. Pemerintah Indonesia menetapkan tingkat kemiskinan sebesar Rp 354.386 per bulan (per kapita) pada tahun 2016. Selain itu, persentase pada tabel di atas mungkin terlihat tidak tepat karena tidak mencapai 100% jika menggunakan nilai garis kemiskinan Bank Dunia, yang mendefinisikan masyarakat miskin adalah mereka yang berpenghasilan kurang dari \$1,25 per hari di Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia dilaporkan hidup dalam kondisi hampir miskin, dan Bank

Dunia memperkirakan bahwa jumlah ini akan meningkat secara dramatis jika kita mengukur jumlah penduduk Indonesia yang hidup dengan pendapatan kurang dari USD \$2 per hari.

Kesenjangan antara kemiskinan di pedesaan dan perkotaan di Indonesia merupakan ciri penting dari situasi kemiskinan di negara ini. Provinsi-provinsi di wilayah timur Indonesia mempunyai tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia, sedangkan pulau Jawa di bagian barat (tempat mayoritas penduduk Indonesia terkonsentrasi) memiliki tingkat kemiskinan tertinggi secara absolut (DR. Isnaini Harahap, MA, 2018)

Distribusi Pendapatan Dan Kemiskinan

Karya Umer Chapra dikutip; di dalamnya, konsep “pemerataan” dibangun atas dasar asumsi keseragaman alokasi sumber daya ekonomi. Mengingat tidak ada filter melanisme dan dorongan untuk memenuhi kebutuhan buta, satu-satunya hal yang memberikan hak suara yang sama kepada setiap orang di pasar adalah distribusi mental uang dan kekayaan. Namun, pendapatan tidak didistribusikan secara adil, dan bahkan mustahil untuk mencapai tujuan ini karena kesenjangan kekayaan yang besar yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti warisan dan akses yang tidak setara terhadap sumber daya seperti kredit dan pendidikan serta perbedaan individu dalam hal-hal seperti bakat, stamina fisik, latar belakang keluarga, dan cita-cita. Karena ketidakadilan yang lazim terjadi, kelompok kaya mampu mengarahkan sumber daya nasional yang terbatas untuk menciptakan komoditas yang tidak dapat diterima secara sosial hanya dengan memanfaatkan hak suara mereka. Karena kekayaan individu mereka begitu tinggi, sistem penetapan harga pasar tidak mampu menahan keinginan mereka untuk mengejar simbol status dan pengeluaran yang berlebihan. Nilai pasar suatu barang dan jasa tidak dipengaruhi oleh jumlah suara yang diberikan atau kebutuhan penggunaannya. Dia hanya tertarik pada berapa banyak orang yang memilih suatu produk atau layanan. Oleh karena itu, dalam masyarakat sekuler, konfigurasi produk dan layanan yang diproduksi pasar tidak dapat sejalan dengan preferensi sebagian besar pelanggan. Kapitalisme membebani mekanisme penetapan harga secara berlebihan karena kapitalisme mengandalkan mekanisme tersebut untuk menyediakan alokasi sumber daya yang memenuhi kriteria yang dapat diterima secara sosial. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan dengan fasih oleh Tawney, “sebagian barang yang diproduksi setiap tahunnya, dan yang dikatakan merupakan kekayaan, pada hakikatnya adalah sampah, karena barang-barang tersebut terdiri dari barang-barang yang meskipun dianggap sebagai bagian dari pendapatan, namun tetap merupakan barang yang tidak berguna. pada hakikatnya adalah sampah (Dr. M. Umer Chapra, 2000)

Berdasarkan literatur yang kami kutip, pemerintah kesulitan melakukan reorientasi kebijakan pembangunan yang menekankan kepentingan masyarakat miskin karena adanya permasalahan termasuk kepentingan politik dan kelembagaan serta struktur kekuasaan. Kita semua harus bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, yang bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Pengentasan kemiskinan memerlukan penelitian yang mendalam dan tidak memihak mengenai topik tersebut, serta sudut pandang yang menarik dari para ahli, perencana, dan pengambil keputusan mengenai penentuan teoritis kemiskinan dan kesenjangan ekonomi serta pola-strategi untuk memperbaikinya. Sebenarnya jika ingin mengacu pada evolusi dan pemikiran ilmu ekonomi, ada banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai respon terhadap permasalahan ekonomi yang kita hadapi, seperti penghapusan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Ini termasuk teori kependudukan Malthus, teori Marx tentang meningkatnya kesengsaraan massa, teori Keynesian tentang “penentuan pendapatan dan lapangan kerja,” dan teori Harrod-Domar tentang “pertumbuhan ekonomi” (Todaro., hal. 73). Jika kita ingin menyelesaikan masalah kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, kita

tidak bisa mengabaikan pembangunan ekonomi, yang masih merupakan hal yang penting dan krusial. Oleh karena itu, persoalannya bukanlah memilih antara pembangunan ekonomi yang cepat dan pemerataan pendapatan. Namun, hal ini bukan hanya sekedar kebijakan atau program tertentu, namun lebih mengenai paradigma pembangunan ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi semua orang dan bukan hanya segelintir orang saja. Singkatnya, rencana dan kebijakan pembangunan ekonomi yang diperlukan tidak hanya terkait dengan peningkatan pertumbuhan PDB, namun juga peningkatan standar hidup sebagian besar masyarakat. Kelompok kaya akan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk meningkatkan kekayaannya, sementara kelompok miskin akan menggunakan setiap sen untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, menurut mereka, ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan masyarakat menabung lebih banyak uang, yang selanjutnya dapat diinvestasikan untuk memacu pembangunan ekonomi yang cepat. Redistribusi pendapatan, kata mereka, akan terjadi sebagai konsekuensi dari program perpajakan dan subsidi jika PDB dan pendapatan per kapita tinggi. Namun, model redistribusi yang berhasil belum terwujud dalam dunia nyata.

Ada sejumlah alasan mengapa sudut pandang ini salah, yang mungkin bisa dijelaskan.

1. Kurangnya kemauan masyarakat kaya (pemilik usaha, pemilik tanah, dan elit) untuk berinvestasi kembali di masyarakat. 20% orang yang berpenghasilan tertinggi di masyarakat kita menghabiskan sebagian besar uang mereka untuk konsumsi yang mencolok, seperti mobil mahal, rumah mewah, dan liburan.
2. rendahnya pendapatan dan standar hidup masyarakat miskin menyebabkan kesehatan yang buruk, gizi yang tidak mencukupi, dan kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas, yang semuanya berdampak buruk pada kapasitas mereka dalam menyelesaikan pekerjaan.
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi secara lokal.
4. Ketika kemiskinan diberantas melalui distribusi sumber daya yang adil, masyarakat akan mendapatkan manfaat dari perekonomian yang berkembang, lebih banyak orang yang terlibat dalam proses pembangunan, dan stabilitas sosial dan politik akan meningkat (Jacob Makapedua, dkk, 2023).

Nurul Huda, dkk, yang bukunya kami kutip, adalah penulisnya. Menurut pemikiran terkini, tiga gagasan berikut (Kemneth, 2003) menjelaskan apa yang menjadikan masyarakat miskin. Teori berbasis nilai adalah yang utama. Mereka belum mencapai apa pun atau mencapai apa pun, sehingga mereka menjadi miskin karena kurangnya kecerdasan, kemalasan, dan tekad. Kedua, sudut pandang yang mengutamakan struktur ekonomi masyarakat. Menurut sudut pandang ini, kemiskinan disebabkan oleh kurangnya akses terhadap sumber daya dan pendidikan. Ketiga, teori yang menekankan pada bagaimana otoritas didistribusikan ke seluruh institusi dan kelompok. Ada anggapan bahwa tatanan dan struktur sosial yang ada saat ini adalah sumber kemiskinan, karena hal ini telah dipaksakan kepada mayoritas masyarakat miskin oleh sekelompok kecil anggota masyarakat yang kuat dan makmur. Ketimpangan merupakan isu utama dalam paradigma pertumbuhan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Ketika kesenjangan ekonomi semakin besar, hal ini pasti akan menimbulkan banyak permasalahan sekunder, seperti peningkatan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan, jumlah orang yang kehilangan pekerjaan, jumlah kejahatan yang dilakukan, kualitas sekolah, dan pembelian barang dan jasa. kekuatan masyarakat umum. Oleh karena itu, revitalisasi paradigma pembangunan ekonomi harus menjadi prioritas utama. Sejauh mana distribusi pendapatan yang lebih adil dapat membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia, dan bagaimana kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin dapat dipersempit (Nurul Huda, dkk, 2015).

KESIMPULAN

Temuan kami menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masih tidak merata di Indonesia, dan masih tingginya angka kemiskinan di negara ini menyulitkan upaya penghapusan kemiskinan sepenuhnya. Ya, adanya kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin karena distribusi uang yang tidak merata, sehingga kesenjangan sosial masih terjadi di masyarakat Indonesia. Kesenjangan pendapatan muncul karena kurangnya ketepatan dalam distribusi sumber daya. Seperti halnya negara-negara berkembang lainnya, ketimpangan merupakan batu sandungan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Inefisiensi distribusi pendapatan menyebabkan ketimpangan dan kemiskinan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan sistem distribusi yang sesuai syariah yang dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan lahir dan batin bagi setiap manusia baik pada tingkat individu, kelompok, dan negara. Namun, pengentasan kemiskinan di Indonesia kini menjadi perhatian sekunder.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti, 1996
- DR. Isnaini Harahap, MA, *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*, Medan : Perdana Publishing, 2018
- Dr. M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta : Gema Insani, 2000
- Jacob Makapedua, dkk, *Distribusi Pendapatan Dan Kemiskinan AKULTURASI*: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan, Vol. 11 No. 1, April 2023, e-ISSN: 2685-4759, p-ISSN: 2337-4195, DOI : <https://doi.org/10.35800/akulturasi.v11i1.46153>
- Michael P. Tadaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga, 1998
- Muh Anas Zarqa, *Islamic Distibutive Scheme*, Islambad : International Institute of Islamic Economics, 1986
- Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta : Kencana, 2015
- Taqyuddun an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Surabaya : Risalah Gusti, 1996
- Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2009